



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona

- Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20169);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah,
- b. Belanja Daerah, dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.871.269.842.040,00 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp528.762.372.078,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp248.619.758.261,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp272.265.551.977,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.637.561.840,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (5) Lain-LAIN Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.239.500.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5

(1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2) terdiri atas:

- a. Pajak Reklame sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- b. Pajak Air Tanah sebesar Rp918.000.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta rupiah);
- c. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp 36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);
- e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);
- f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).
- g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp41.598.000.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- h. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
 2. Tenaga Listrik sebesar Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);
 3. Jasa Perhotelan sebesar Rp628.000.000,00 (enam ratus dua puluh delapan juta rupiah);
 4. Jasa Parkir sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- i. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp40.057.662.290,00 (empat puluh miliar lima puluh

tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah); dan

- j. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp51.321.095.971,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

(2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp253.027.308.477,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

- 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp247.528.160.391,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), meliputi:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp87.128.160.391,00 (delapan puluh tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah);

- b) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar); dan

- c) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),

- 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp1.605.589.336,00 (satu miliar enam ratus lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp1.309.729.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 4. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp2.551.829.750,00 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), meliputi:
 - a) Retribusi Los sebesar Rp1.004.159.750,00 (satu miliar empat juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
 - b) Retribusi Kios sebesar Rp1.547.670.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 5. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp10.683.243.500,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp2.210.873.100,00 (dua miliar dua ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), meliputi:
 - a) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Rp1.203.672.100,00 (satu miliar dua ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah);
 - b) Retribusi Penyewaan Bangunan sebesar Rp397.201.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus satu ribu rupiah);

- c) Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah); dan
 - d) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp1.393.750.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp6.360.335.400,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 4. Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
 5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp155.340.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp521.445.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) meliputi:
 - a) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman sebesar Rp272.850.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak sebesar Rp147.795.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); dan

- c) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan sebesar Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah),
7. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp8.555.000.000,00 (delapan miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah), terdiri atas:
 - 1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); dan
 - 2. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp6.637.561.840,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), terdiri atas:
- a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Jasa Giro sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.334.317.469.962,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus

- tujuh belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.211.567.672.000,00 (dua triliun dua ratus sebelas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Dana Desa sebesar Rp354.287.813.000,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp106.559.467.000,00 (seratus enam miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 1. DBH Pajak sebesar Rp90.294.121.000,00 (sembilan puluh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
 2. DBH PBB sebesar Rp14.505.732.000,00 (empat belas miliar lima ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 3. DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp73.346.269.000,00 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 4. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND sebesar Rp2.442.120.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 5. DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp14.645.603.000,00 (empat belas miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga ribu rupiah);

6. DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi sebesar Rp11.590.310.000,00 (sebelas miliar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 7. DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty sebesar Rp1.753.797.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 8. DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp173.276.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 9. DBH SDA Perikanan sebesar Rp1.128.220.000,00 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 10. DBH Lainnya sebesar Rp1.619.743.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah); dan
 11. DBH Sawit sebesar Rp1.619.743.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.162.058.834.000,00 (satu triliun seratus enam puluh dua miliar lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:
1. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp880.135.339.000,00 (delapan ratus delapan puluh miliar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 2. DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp281.923.495.000,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 3. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

4. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebesar Rp12.777.257.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 5. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebesar Rp136.331.325.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 6. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebesar Rp107.787.383.000,00 (seratus tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 7. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp24.027.530.000,00 (dua puluh empat miliar dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp588.661.558.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:
1. DAK Fisik sebesar Rp32.571.965.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 2. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan sebesar Rp9.279.139.000,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 3. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD sebesar Rp2.548.442.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

4. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD sebesar Rp350.087.000,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 5. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP sebesar Rp702.250.000,00 (tujuh ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana sebesar Rp2.115.156.000,00 (dua miliar seratus lima belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
 7. DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah sebesar Rp8.280.000.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah); dan
 8. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM sebesar Rp9.296.891.000,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- e. DAK Non Fisik sebesar Rp556.089.593.000,00 (lima ratus lima puluh enam miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
1. DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum sebesar Rp599.882.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 2. DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 3. DAK Non Fisik-BOKB-KB sebesar Rp14.830.800.000,00 (empat belas miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 4. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp400.660.000,00

- (empat ratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
5. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler sebesar Rp178.639.596.000,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 6. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja sebesar Rp6.132.250.000,00 (enam miliar seratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 7. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler sebesar Rp20.146.056.000,00 (dua puluh miliar seratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu rupiah);
 8. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 9. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler sebesar Rp8.458.440.000,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 10. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 11. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota sebesar Rp10.777.264.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 12. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp357.039.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 13. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas sebesar Rp26.538.682.000,00 (dua puluh enam miliar lima

ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

14. DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp273.401.422.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus satu juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 15. DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp3.294.750.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 16. DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru sebesar Rp11.297.752.000,00 (sebelas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.749.797.962,00 (seratus dua puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak, terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp38.242.049.257,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus empat puluh dua juta empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp616.772.047,00 (enam ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah); dan

- c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp83.890.976.658,00 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 7

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp8.190.000.000,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.190.000.000,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) yaitu Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 8

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.924.444.842.040,00 (dua triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 9

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp2.225.819.550.682,00 (dua triliun dua ratus dua puluh lima miliar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.440.900.529.311,00 (satu triliun empat ratus empat puluh miliar sembilan ratus juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp706.738.285.371,00 (tujuh ratus enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp255.000.500,00 (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus rupiah).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp71.832.935.500,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.092.800.000,00

(enam miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp922.806.898.851,74 (sembilan ratus dua puluh dua miliar delapan ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu koma tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp415.612.143.663,26 (empat ratus lima belas miliar enam ratus dua belas juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga koma dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.512.327.688,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.555.111.868,00 (satu miliar lima ratus lima puluh

lima juta seratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah)
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp66.562.047.240,00 (enam puluh enam miliar lima ratus enam puluh dua juta empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang sebesar Rp75.255.801.102,00 (tujuh puluh lima miliar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus satu ribu seratus dua rupiah); dan
 - b. Belanja Jasa sebesar Rp205.621.701.501,00 (dua ratus lima miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus satu ribu lima ratus satu rupiah).
- (2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp40.482.847.000,00 (empat puluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp2.707.792.500,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP sebesar Rp28.642.296.000,00 (dua puluh delapan miliar enam

ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp5.092.800.000,00 (lima miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp160.327.766.490,00 (seratus enam puluh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.160.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp66.388.256.104,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp49.917.884.636,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp32.364.966.450,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp9.496.659.300,00 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 13

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp29.772.166.783,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp508.525.358.085,00 (lima ratus delapan miliar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.375.714.985,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp481.149.643.100,00 (empat ratus delapan puluh satu

miliar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah).

Pasal 15

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp53.175.000.000,00 (lima puluh tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah), terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 16

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah), terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
- (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.

- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
- (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00.
- (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 17

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri atas:

- a. Penghematan Belanja sebesar Rp0,00.
- b. Sisa Belanja Lainnya sebesar Rp0,00.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp1.825.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.825.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 19

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp1.825.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp53.175.000.000,00) (lima puluh tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan mengakibatkan terjadinya (surplus) sebesar Rp53.175.000.000,00 (lima puluh tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

GUNAWAN RUSMINTO

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 18 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.
NIP. 19810228 200604 2 009



KABUPATEN LEBAK
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	528.762.372.078,00
4.1.01	Pajak Daerah	248.619.758.261,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.200.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.200.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.200.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	918.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	918.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	918.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	36.000.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	36.000.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	36.000.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	32.500.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	32.500.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	32.500.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	45.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	45.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	45.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	41.598.000.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	8.000.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	8.000.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	32.500.000.000,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	32.500.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	628.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	628.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	350.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	350.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	120.000.000,00
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	120.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	40.057.662.290,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.20.01	Opsen PKB	40.057.662.290,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	40.057.662.290,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	51.321.095.971,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	51.321.095.971,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	51.321.095.971,00
4.1.02	Retribusi Daerah	272.265.551.977,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	253.027.308.477,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	247.528.160.391,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	87.128.160.391,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	160.000.000.000,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	400.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.605.589.336,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.605.589.336,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.309.729.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.309.729.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.551.829.750,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.004.159.750,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.547.670.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	32.000.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	32.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	10.683.243.500,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.210.873.100,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.203.672.100,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	397.201.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	310.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	300.000.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	1.393.750.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	1.393.750.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	6.360.335.400,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	6.360.335.400,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	11.500.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	11.500.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	155.340.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	155.340.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	521.445.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	272.850.000,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	147.795.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	100.800.000,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	30.000.000,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	30.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	8.555.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.000.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.000.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	555.000.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	555.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.637.561.840,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.637.561.840,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.637.561.840,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.637.561.840,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.239.500.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	239.500.000,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	239.500.000,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	239.500.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.000.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.334.317.469.962,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.211.567.672.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	354.287.813.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	354.287.813.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	354.287.813.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	106.559.467.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	90.294.121.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	14.505.732.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	73.346.269.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	2.442.120.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	14.645.603.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	11.590.310.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.753.797.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	173.276.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.128.220.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	1.619.743.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	1.619.743.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.162.058.834.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	880.135.339.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	880.135.339.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	281.923.495.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.000.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	12.777.257.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	136.331.325.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	107.787.383.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	24.027.530.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	588.661.558.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	32.571.965.000,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	9.279.139.000,00
4.2.01.09.01.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	2.548.442.000,00
4.2.01.09.01.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	350.087.000,00
4.2.01.09.01.0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	702.250.000,00
4.2.01.09.01.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	2.115.156.000,00
4.2.01.09.01.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	8.280.000.000,00
4.2.01.09.01.0082	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	9.296.891.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	556.089.593.000,00
4.2.01.09.02.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	599.882.000,00
4.2.01.09.02.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	750.000.000,00
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	14.830.800.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	178.639.596.000,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	6.132.250.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	20.146.056.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	195.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	8.458.440.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	270.000.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	10.777.264.000,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	357.039.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	26.538.682.000,00
4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	273.401.422.000,00
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	3.294.750.000,00
4.2.01.09.02.0038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	11.297.752.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	122.749.797.962,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	122.749.797.962,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	122.749.797.962,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	38.242.049.257,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	616.772.047,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	83.890.976.658,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.190.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	8.190.000.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	8.190.000.000,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	8.190.000.000,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	8.190.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.871.269.842.040,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.225.819.550.682,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.440.900.529.311,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	922.806.898.851,74
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	695.447.780.622,04
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	460.053.986.154,04
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	235.393.794.468,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	66.022.659.858,22
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	42.543.001.796,22
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	23.479.658.062,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.532.623.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.532.623.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	35.924.161.937,20
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	35.916.601.937,20
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.560.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	16.023.960.050,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.642.470.050,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	13.381.490.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	38.802.660.680,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	23.322.238.600,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	15.480.422.080,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.966.343.161,60
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.878.713.690,60
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.087.629.471,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.343.374,44
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.286.201,96
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.057.172,48

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	44.323.819.409,52
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	32.626.927.308,52
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	11.696.892.101,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.669.053.966,64
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.089.422.175,64
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	579.631.791,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	5.007.161.897,72
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	3.362.655.529,72
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	1.644.506.368,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	3.073.330.894,36
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.878.468.365,36
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.194.862.529,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	415.612.143.663,26
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	106.287.700.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	106.252.700.000,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	35.000.000,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	35.000.000,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	35.000.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	8.321.154.561,26
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	8.321.154.561,26
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	300.968.289.102,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	1.570.000,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	20.000.000,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	300.000,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	49.204.200,00
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	81.250.000,00
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	875.000,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	35.346.213,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	1.025.088,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.476.126.000,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.251.363.750,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.847.919.500,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.615.311.093,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.104.344.559,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsep Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.642.504.356,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	36.396.250,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	80.279.467,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	65.486.450,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	267.004.978,00
5.1.01.02.06.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	1.600.000,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	90.902.119,00
5.1.01.02.06.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal	13.610.000,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	575.000,00
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	9.267.000,00
5.1.01.02.06.0045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.485.600,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000,00
5.1.01.02.06.0056	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	62.021.875,00
5.1.01.02.06.0057	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	48.202.844,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	273.401.422.000,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	11.297.752.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.294.750.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.767.393.760,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	33.512.327.688,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.996.400,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.996.400,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.808.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.808.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	152.737.200,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	152.737.200,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	22.588.797,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	22.588.797,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.300.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.300.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.575.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.575.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	528.055.395,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	528.055.395,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	11.818.696.896,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	288.000.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.674.224,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	8.022.672,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	11.520.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.960.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.960.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.555.111.868,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.605.240,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.605.240,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.772,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.772,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.420.960,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.420.960,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.369.703.671,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	3.454.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	44.000.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	660.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	6.600.000,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	178.750.000,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1.925.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	7.344.000,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	137.500,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	198.000.000,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	178.750.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	247.500.000,00
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	282.266.028,00
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	220.317.143,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	8.220.025,00
5.1.01.05.11.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	7.665.625,00
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	554.400,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	66.562.047.240,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	66.562.047.240,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	66.562.047.240,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	706.738.285.371,00
5.1.02.01	Belanja Barang	75.255.801.102,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	75.198.201.102,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	12.960.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	756.369.700,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	763.356.694,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	20.575.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.141.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	13.775.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	754.249.200,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	412.868.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	255.564.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	7.248.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.888.125.005,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.164.378.153,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	929.834.200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	136.970.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.263.312.161,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.101.983.586,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.608.671.678,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	58.089.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	241.468.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	394.966.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.786.218.944,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	100.095.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	7.459.921.381,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.639.528.500,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.805.401.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	201.526.500,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	443.100.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.234.020.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.190.565.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	7.078.145.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	30.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	30.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	110.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	389.572.900,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	9.250.000,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	6.250.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	30.920.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	52.848.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	412.950.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	397.984.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	57.600.000,00
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	57.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	205.621.701.501,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	123.745.127.179,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	537.450.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.580.790.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.589.390.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	336.500.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.094.816.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	214.700.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	43.000.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	13.650.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	32.400.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	564.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.680.300.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8.896.087.700,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	865.809.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.116.331.600,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	294.000.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	7.410.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	360.880.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	31.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	176.800.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.733.860.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.503.923.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	10.077.800.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.421.400.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.867.472.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.115.660.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	356.832.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	268.800.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	48.500.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	408.550.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	24.130.000,00
5.1.02.02.01.0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	2.231.025.440,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	110.000.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	57.226.500,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	435.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.170.525.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	95.869.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	90.173.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	26.250.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	300.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.771.814.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	401.820.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	58.905.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.141.103.559,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	396.031.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.290.563.540,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	22.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.139.200.000,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	8.759.997.500,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.736.387.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	58.992.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	747.373.340,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.068.560.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	344.070.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	56.496.460.033,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	50.853.474.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.747.200.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.898.185.833,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	174.967.200,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	219.033.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	603.600.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.179.300.200,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	604.500.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	80.072.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	174.274.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	25.954.200,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	6.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	127.500.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	22.500.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	3.500.000,00
5.1.02.02.04.0453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	105.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	815.000.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	120.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	326.000.000,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	219.000.000,00
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	150.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	85.000.000,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	85.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	11.719.759.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.540.000.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	400.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.575.000.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	1.944.759.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	3.430.000.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.300.000.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	300.000.000,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	30.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.475.086.900,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	255.086.900,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	455.000.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	800.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	965.000.000,00
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	1.000.000.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.680.000,00
5.1.02.02.10.0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	1.680.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	50.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	20.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	30.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.976.082.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.696.212.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	3.465.800.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.451.750.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	362.320.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	996.319.800,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	4.195.800,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.207.600,00
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	97.200,00
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	125.874.000,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	194.760.000,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	157.334.400,00
5.1.02.02.13.0019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	145.216.800,00
5.1.02.02.13.0020	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	191.808.000,00
5.1.02.02.13.0021	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	173.826.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	81.886.389,00
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	62.830.212,00
5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	5.984.718,00
5.1.02.02.14.0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	13.071.459,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	22.435.994.747,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.615.148.382,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	6.644.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	180.000.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	11.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.415.535.682,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	45.500.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	300.000.000,00
5.1.02.03.02.0045	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	260.000.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	115.000.000,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	16.000.000,00
5.1.02.03.02.0111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	5.126.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	319.900.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	429.334.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	42.000.000,00
5.1.02.03.02.0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	327.067.200,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	32.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	830.091.500,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	23.000.000,00
5.1.02.03.02.0426	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	226.950.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.549.016.365,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.459.016.365,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	90.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.219.830.000,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	4.899.830.000,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.320.000.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12.000.000,00
5.1.02.03.05.0033	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	12.000.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	40.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	40.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	84.114.082.400,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	84.114.082.400,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.667.988.400,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	991.150.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.897.510.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.910.782.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.646.652.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.272.991.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.272.991.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	294.896.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.978.095.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	138.965.480.500,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	138.804.192.500,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	138.804.192.500,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	161.288.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	161.288.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	178.072.234.121,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	178.072.234.121,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	178.072.234.121,00
5.1.04	Belanja Subsidi	255.000.500,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	255.000.500,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	255.000.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	255.000.500,00
5.1.05	Belanja Hibah	71.832.935.500,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	40.482.847.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.234.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.234.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	10.526.346.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	10.427.076.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	99.270.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	19.697.501.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.285.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	15.412.501.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.707.792.500,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.707.792.500,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.707.792.500,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	28.642.296.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	20.101.056.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	20.101.056.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	8.541.240.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	8.541.240.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.092.800.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.092.800.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5.092.800.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.092.800.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.000.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.000.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	160.327.766.490,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.160.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	160.000.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	160.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	160.000.000,00
5.2.01.99	Belanja Modal Tanah BLUD	2.000.000.000,00
5.2.01.99.99	Belanja Modal Tanah BLUD	2.000.000.000,00
5.2.01.99.99.9999	Belanja Modal Tanah BLUD	2.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.388.256.104,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.500.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.500.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	1.500.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	8.165.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7.335.000.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.800.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	135.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	4.400.000.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	830.000.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	80.000.000,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	750.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	120.280.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	65.500.000,00
5.2.02.03.02.0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	65.500.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	54.780.000,00
5.2.02.03.03.0007	Belanja Modal Universal Tester	52.200.000,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	2.580.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	58.666.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	58.666.000,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	21.000.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	4.625.000,00
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	5.841.000,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	27.200.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.962.748.140,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	411.286.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	8.348.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	402.938.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.511.462.140,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.165.639.400,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	26.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	442.078.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	793.966.740,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	83.778.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	40.000.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	40.000.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	57.980.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	54.680.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	54.680.000,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	3.300.000,00
5.2.02.06.04.0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	3.300.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.500.000.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.500.000.000,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.407.307.380,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.092.692.620,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.883.420.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	299.920.000,00
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	71.920.000,00
5.2.02.08.01.0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	228.000.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	2.523.500.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	2.523.500.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	60.000.000,00
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	13.500.000,00
5.2.02.08.07.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	46.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.648.764.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.534.521.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.524.521.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	10.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.114.243.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.112.443.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.800.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	354.646.700,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	221.646.700,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	110.880.000,00
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	12.953.700,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	86.491.000,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	11.322.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	133.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	133.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.318.726.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.318.726.000,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	760.000.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	558.726.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	36.987.913.200,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	36.966.181.200,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	36.966.181.200,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	21.732.000,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	21.732.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.328.612.064,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.328.612.064,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.328.612.064,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.917.884.636,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	49.245.914.500,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	47.276.444.500,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.040.175.500,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	6.218.620.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	28.377.185.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	9.640.464.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	0,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.969.470.000,00
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	1.969.470.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	671.970.136,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	671.970.136,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	671.970.136,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.364.966.450,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	24.739.685.500,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	24.739.685.500,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	23.212.939.500,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.526.746.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	0,00
5.2.04.01.02.0012	Belanja Modal Jembatan Pengukur	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	7.187.734.650,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.363.943.600,00
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	4.363.943.600,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.523.791.050,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.523.791.050,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	300.000.000,00
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	300.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	257.546.300,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	207.546.300,00
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	207.546.300,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	50.000.000,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	50.000.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	180.000.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	180.000.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	180.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.496.659.300,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	251.007.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	251.007.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	251.007.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	9.245.652.300,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	9.241.472.300,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	9.241.472.300,00
5.2.05.89.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	4.180.000,00
5.2.05.89.03.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	4.180.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	29.772.166.783,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	29.772.166.783,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	29.772.166.783,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	29.772.166.783,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	29.772.166.783,00
5.4	BELANJA TRANSFER	508.525.358.085,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	27.375.714.985,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	24.861.975.826,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	24.861.975.826,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	24.861.975.826,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.513.739.159,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.513.739.159,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.513.739.159,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	481.149.643.100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	481.149.643.100,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	481.149.643.100,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	354.287.813.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	126.861.830.100,00
	Jumlah Belanja	2.924.444.842.040,00
	Total Surplus/(Defisit)	-53.175.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.000.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	55.000.000.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	40.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	18.250.000.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	10.250.000.000,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	8.500.000.000,00
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	500.000.000,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	1.500.000.000,00
6.1.01.05.01.0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000.000,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	15.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	15.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.825.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.825.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.825.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.825.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.825.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.825.000.000,00
	Pembiayaan Netto	53.175.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Lebak,

Pj Bupati

GUNAWAN RUSMINTO A.P., M.Si